

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia menurut UU No. 23 Tahun (UU RI, 2014) tentang Pemerintahan Daerah. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa melalui proses pemilihan Desa. Desa memiliki otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat, asal-usul, dan budaya yang hidup di masyarakat. Otonomi ini memungkinkan Desa untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, Desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya, termasuk sumber daya alam dan keuangan Desa, yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Desa mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pendampingan ini meliputi bantuan teknis, pembinaan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa Desa mampu melaksanakan otonominya dengan baik. Tujuan utama dari otonomi Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di desa (Puluhulawa & Tome, 2023).

Dalam prosesnya Desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya, baik sumber daya alam maupun keuangan Desa, yang diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Ifitah & Wibowo, 2022). APBDes merupakan dokumen keuangan tahunan yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

Desa. Melalui APBDes, Desa dapat mengalokasikan dana untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Pengelolaan keuangan Desa ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, Desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk memanfaatkan dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan hutan Desa, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah Desa. Pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Selain itu, Desa juga mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, mengurangi kesenjangan pembangunan antara Desa dan kota, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa secara keseluruhan. Dengan demikian, kewenangan Desa dalam mengelola sumber daya dan keuangan Desa merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat otonomi Desa dan memberdayakan masyarakat lokal (Kurniawan, 2024).

Dalam mengalokasikan sumber daya Desa untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan, kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan menjadi elemen penting. Kemitraan ini memungkinkan desa untuk memanfaatkan keahlian, teknologi, dan sumber daya finansial dari sektor swasta guna mendukung berbagai program pembangunan. Misalnya, perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selain itu, perusahaan dapat membantu dalam pengembangan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, dan program pemberdayaan ekonomi. Kerjasama ini juga memungkinkan adanya transfer teknologi dan pengetahuan yang bisa

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam Desa. Perusahaan dapat bermitra dengan Desa untuk menerapkan teknik pertanian modern yang ramah lingkungan, meningkatkan hasil panen, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat membantu Desa dalam mengembangkan sumber olahan pertanian alam menjadi bahan jadi untuk tujuan menambah perekonomian warga dan Desa. Pemberdayaan melalui kemitraan ini harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat Desa. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka. Kerjasama dengan pihak swasta tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa, tetapi juga memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengacu pada dasar hukum CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Terkait kewajiban CSR perusahaan di Indonesia, dalam Pasal 74 UU PT menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perusahaan besar di Indonesia wajib menyalurkan bantuan CSR nya kepada Masyarakat, sesuai tertera dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Faktanya TJSL atau CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan secara luas, baik yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP RI, 2012)

Collaborative governance adalah suatu kerangka kerja atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang andil didalamnya termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Dengan bertujuan untuk bekerja sama dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan atau program tertentu yang akan dijalankan. Penelitian ini *collaborative governance triple helix* digunakan karena melibatkan kerjasama antar tiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan akademisi. Partisipasi aktif dan kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan, efisiensi pelaksanaan, dan keberlanjutan hasil yang ingin dicapai. *Collaborative governance* menekankan pada dialog terbuka, pembagian tanggung jawab, dan penciptaan konsensus di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, model ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dari pendekatan *top-down* tradisional dan mendorong solusi yang lebih inovatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Cahyono, 2021).

Collaborative governance dalam konteks tujuan pembangunan desa adalah suatu pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan Desa (Kirana & Artisa, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan dapat menciptakan keputusan yang lebih baik dan efektif, karena setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang signifikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Selain itu, kolaborasi ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal, transparansi yang lebih tinggi, dan peningkatan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan Desa. Pendekatan *collaborative governance* menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan Desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat setempat, serta mampu menghadapi tantangan dan dinamika yang ada. Dalam hal ini kerjasama antara pemerintah Desa Broto dan PT Astra Internasional Tbk dalam program Desa Sejahtera Astra (DSA) yang bertujuan untuk mengembangkan potensi Desa melalui program pengembangan produk pertanian berkelanjutan dalam pengolahan kunyit untuk diekspor ke luar negeri sebagai tambahan pendapatan warga Desa Broto dalam pembangunan berkelanjutan (Kirana & Artisa, 2020).

Pembangunan berkelanjutan menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan lingkungan mencakup perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*), yang mencakup 17 tujuan global untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. SDGs menjadi kerangka kerja utama dalam upaya menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan kekayaan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman ini menjadi aset penting bagi negara karena menyediakan berbagai sumber daya alam. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yaitu mencakup keanekaragaman genetik tumbuhan obat dan rempah-rempah yang telah lama menjadi komoditas ekspor utama (Prasetyo et al., 2024). Melalui sumber daya rempah-rempah yang melimpah maka pelestarian dan pengelolaan secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati. Rempah-rempah telah lama menjadi sumber daya yang berharga bagi masyarakat, salah satunya adalah kunyit menjadi komoditas perdagangan penting di pasar global, menciptakan lapangan

kerja bagi petani, pengumpul, dan pedagang lokal. Hal ini menguntungkan bagi ekonomi lokal maupun nasional, memperkuat basis ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dari ekspor. Dengan demikian, sumber daya rempah-rempah tidak hanya mempertahankan warisan budaya yang kaya tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nugraha, 2023).

Di Indonesia, sektor pertanian memegang peranan strategis dalam mendukung ekonomi lokal serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Wibowo, 2020). Diberbagai sektor komoditas yang menjadi fokus, rempah-rempah, terutama kunyit, memiliki peranan penting. Kunyit tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku untuk industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan tradisional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan diri pada pertanian. Di daerah-daerah seperti desa-desa di Indonesia yang kaya akan kunyit, pertanian rempah-rempah menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi banyak keluarga. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, pengelolaan tanah yang berkelanjutan, dan akses pasar yang terbatas, tetap menjadi isu yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat petani di Indonesia (Wibowo, 2020).

Kunyit merupakan rempah-rempah yang mempunyai beragam manfaat terutama bagi kesehatan dan kegunaan lainnya. Secara tradisional, kunyit dibuat sebagai bahan penting dalam masakan untuk menambahkan rasa dan aroma yang khas. Tetapi, manfaat kunyit tidak hanya terbatas bahan kuliner saja. Sebagai bahan alami, kunyit sekarang banyak digunakan dalam industri kosmetik untuk perawatan kulit, rambut dan untuk pembuatan pewarna alami. Indonesia kunyit dapat tumbuh subur dengan alami karena iklim di Indonesia yang tropis sehingga tanaman apapun akan tumbuh subur. Melalui berbagai manfaat kunyit sangat diperlukan bagi kehidupan sehari-hari dan dapat menambah perekonomian masyarakat. Pertanian kunyit memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pedesaan, menjadikannya tidak hanya sebagai sumber bahan pangan dan obat

tradisional, namun juga sebagai asset ekonomi yang bernilai tinggi bagi kehidupan dan keberlanjutan lokal dalam menjadikannya pengembangan produk pertanian yang berkelanjutan (Kusbiantoro & Purwaningrum, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, program-program korporat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa semakin mendapat perhatian. Salah satunya adalah program "Desa Sejahtera Astra" yang digagas oleh PT Astra Internasional Tbk di Indonesia. Program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam desa itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk desa melalui berbagai inisiatif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa masyarakat desa dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, serta membuka peluang bagi mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Desa Broto, yang terletak di wilayah Selatan Kabupaten Ponorogo tepatnya di Kecamatan Slahung yang hampir berbatasan langsung dengan daerah Pacitan ini mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah karena terletak di daerah pegunungan sehingga dapat dengan mudah untuk menanam berbagai macam tumbuhan. Dengan suburnya tanah yang dimiliki maka pemerintah desa bekerjasama dengan PT Astra Internasional Tbk dalam hal membudidayakan rempah-rempah khususnya tanaman kunyit. Kunyit menjadi fokus utama dalam implementasi program ini karena banyaknya peminat dari berbagai mancanegara. Kolaborasi antara PT Astra Internasional Tbk dan Pemerintah Desa Broto menjadi kunci dalam upaya mengelola sumber daya rempah-rempah kunyit secara berkelanjutan. Pendekatan *collaborative governance* dipilih untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlibat diakomodasi dengan baik. Aspek ekonomi dijaga melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan peningkatan pendapatan petani kunyit. Pemerintah Desa Broto mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat yang adil. Sementara itu, aspek lingkungan diperhatikan dengan ketat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem kunyit dan lahan pertanian. Dengan pendekatan ini,

program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal tetapi juga melestarikan lingkungan alam untuk generasi mendatang.

Namun, dalam konteks praktis, implementasi *collaborative governance* antara korporasi besar dan pemerintah lokal tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti pengaturan kelembagaan, alokasi sumber daya, perbedaan kepentingan, dan pengelolaan konflik mungkin timbul dalam perjalanan implementasi program ini. Melalui latar belakang ini, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang bagaimana *collaborative governance* antara PT Astra Internasional Tbk dan Pemerintah Desa Broto dalam Program Desa Sejahtera Astra dalam pengembangan produk pertanian serta upaya mereka untuk mengelola secara berkelanjutan sumber daya. Keberlanjutan baik dalam programnya ataupun keberlanjutan untuk lingkungannya, keberlanjutan lingkungan terkait dengan semua usaha yang dilakukan tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah *bagaimana collaborative governance triple helix dalam program Desa Sejahtera Astra di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan *collaborative governance triple helix* dalam program Desa Sejahtera Astra di Desa Broto Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui manfaat program Desa Sejahtera Astra untuk masyarakat Desa Broto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman tentang bagaimana *collaborative governance* dapat diterapkan secara efektif antara sektor swasta dan pemerintah lokal dalam konteks pengembangan program CSR berbasis desa. Hal ini dapat memberikan wawasan baru terhadap kerangka kerja teoritis *collaborative governance* yang relevan untuk penelitian-penelitian dimasa depan. Dan melalui studi kasus ini, peneliti dapat menyumbangkan perpektif baru tentang implementasi CSR berbasis desa, termasuk cara integrasi antara inisiatif Perusahaan dan kebutuhan Pembangunan lokal yang dipimpin oleh pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk menambah wawasan tentang hubungan pemerintah Desa dengan sektor swasta dalam hal ini perusahaan dan petani yang dilibatkan dalam program pengembangan produk pertanian berkelanjutan. Proses *collaborative governance triplehelix* digunakan karena melibatkan beberapa pihak yang ikut andil dalam program desa sejahtera astra. Melalui pemahaman tersebut dapat menjelaskan proses pelaksanaan program dalam memanfaatkan potensi desa melalui program berkelanjutan. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk memahami makna dari istilah-istilah yang nanti digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan hal ini dengan merujuk pada definisi-definisi dari para ahli atau literatur yang relevan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam penulis terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.5.1 *Collaborative Governance*

Collaborative governance adalah proses tata kelola kolaboratif pemerintahan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan

memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan perspektif yang berbeda. *Collaborative governance* yaitu digunakan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dengan sektor swasta agar tercapai pembangunan berkelanjutan. Konsep *collaborative governance* digunakan dengan melihat kondisi sumber daya yang kurang seimbang terjadi di pemerintah sehingga perlu adanya proses kerjasama dengan pihak luar agar menghasilkan hasil yang maksimal (Kirana & Artisa, 2020).

1.5.2 Program Desa Sejahtera Astra

Program Desa Sejahtera Astra (DSA) adalah inisiatif CSR dari PT Astra International Tbk, perusahaan konglomerasi terkemuka di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Program ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan modal usaha bagi para petani kunyit di desa Broto, kecamatan Slahung agar dapat mengembangkan usaha mereka. Astra tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan program-program ini. Program Sejahtera Astra juga menekankan pada pembangunan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, untuk membantu mereka mandiri secara ekonomi. Program desa sejahtera astra menjadi salah satu contoh dari upaya perusahaan swasta dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Wanti et al., 2022).

1.5.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian terhadap sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam strategi operasional dan interaksi mereka dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini meliputi kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, serta menjalankan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Perusahaan yang menerapkan CSR berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menyediakan kondisi kerja yang aman dan adil bagi karyawan, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat di sekitarnya melalui berbagai program dan inisiatif sosial. Dengan melakukan hal ini, perusahaan tidak hanya menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, tetapi juga memperkuat citra mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya (Shakila et al., 2024).

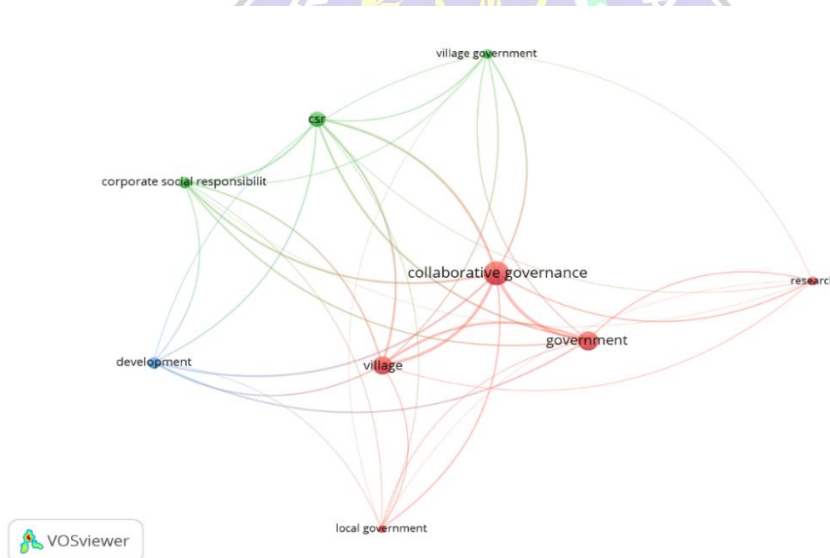
1.5.4 *Triple Helix*

Collaborative governance dalam konteks model *triple helix* mengacu pada kerjasama yang melibatkan tiga aktor utama: pemerintah, industri, dan akademisi. Dalam model ini, pemerintah bertindak sebagai pengatur dan fasilitator yang menciptakan kebijakan dan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Industri memainkan peran penting dalam menerapkan inovasi dan teknologi baru yang dikembangkan, sekaligus memberikan umpan balik praktis yang dapat membantu meningkatkan relevansi penelitian akademis. Akademisi, di sisi lain, menyediakan pengetahuan dan penelitian yang menjadi dasar bagi inovasi dan pengembangan teknologi. Melalui sinergi antara ketiga aktor ini, *collaborative governance* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengembangan teknologi. Namun dalam penelitian ini bukan akademisi dilibatkan melainkan petani atau Masyarakat yang ikut andil didalam prosesnya. Model *triple helix* ini mendorong kolaborasi yang dinamis dan adaptif, dimana setiap aktor saling melengkapi dan mendukung, menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

1.6 Literatur Review

Dalam topik penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini, akan menjelaskan tentang bagaimana program Desa Sejahtera Astra dilaksanakan di Desa Broto Kecamatan Slahung yang menjadi kewajiban bagi perusahaan swasta PT. Astra Internasional Tbk dalam melaksanakan kewajibannya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Perusahaan. *Corporate Social Responsibility* atau Program CSR adalah suatu konsep dimana perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya seperti masalah polusi, limbah, sampai masalah keamanan. Fokus dari penelitian ini membahas apakah sudah efektif program perusahaan menggunakan CSR nya kepada pemerintah desa Broto dalam melaksanakan kerjasama terkait pengelolaan produk kunyit di Desa Broto Kecamatan Slahung.

Gambar 1. 1 Vos Viewers



(Sumber: Vos Viewers)

Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan penelitian karena masih banyak yang belum meneliti terkait permasalahan tersebut. Dapat dibuktikan dengan analisis dari 482 jurnal *vos viewers* yang membahas terkait *collaborative governance*. Dari 482 jurnal tersebut terdapat 16 jurnal penelitian yang membahas tentang *village government*.

Tentunya topik ini masih jarang untuk dibahas dan dikaji untuk penelitian ini

Sebagai tambahan referensi dalam penelitian ini dan untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka terdapat beberapa penelitian yang dikutip sebagai berikut. Penelitian pertama, yaitu ditulis oleh Ana Melani, Tommi Hidayat, dan Nurul Chamidah (2022) melalui artikel yang berjudul "Dampak Pendampingan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Astra Internasional pada Pembangunan Desa Wisata Kota Tua Jamblang Kabupaten Cirebon", tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak setelah pendampingan pemberdayaan desa melalui program CSR PT Astra Internasional terhadap masyarakat desa Jamblang Kabupaten Cirebon. Melalui penelitian ini, terungkap bahwa di Desa Jamblang terdapat pendampingan dan pemberdayaan yang mengakibatkan tiga dampak, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan. Dampak sosial ditandai dengan meningkatnya semangat dan dedikasi warga yang terkabung dalam kelompok sadar wisata untuk melaksanakan program kerja yang telah disepakati. Dampak lingkungan diwujudkan melalui penghiasan area wisata yang mengandung pemahaman mengenai Sejarah Desa Jamblang. Dampak ekonomi terlihat dari pelatihan fotografi yang diberikan secara gratis kepada kelompok sadar wisata, serta adanya peningkatan minat terhadap kue tradisional khas Pecinaan dan nasi langgi.

Penelitian kedua, yaitu oleh (Nurlatifa et al., 2020) dengan artikel berjudul "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Astra Internasional Tbk melalui Program Lingkungan Kampung Berseri" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana divisi CSR dan tim CSR Kampung Berseri PT. Astra Internasional Tbk melaksanakan tahapan CSR yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Kampung Berseri PT Astra International Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pada tahap perencanaan yaitu penentuan tujuan CSR Kampung Berseri PT Astra International Tbk mengacu pada visi dan misi utama perusahaan, mengidentifikasi target sasaran dan membentuk tugas

disetiap area. Kedua, pada tahap implementasi SCR Kampung Berseri PT. Astra International Tbk melaksanakannya dengan panduan Astra International. *Friendly Company* dan strategi sentralisasi serta *self-managing*. Terdapat kendala dalam pendampingan SDM. Ketiga, tahap evaluasi dilakukan setiap satu semester sekali dengan cara monitoring dan progress report melalui lembar balik, yang juga melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan.

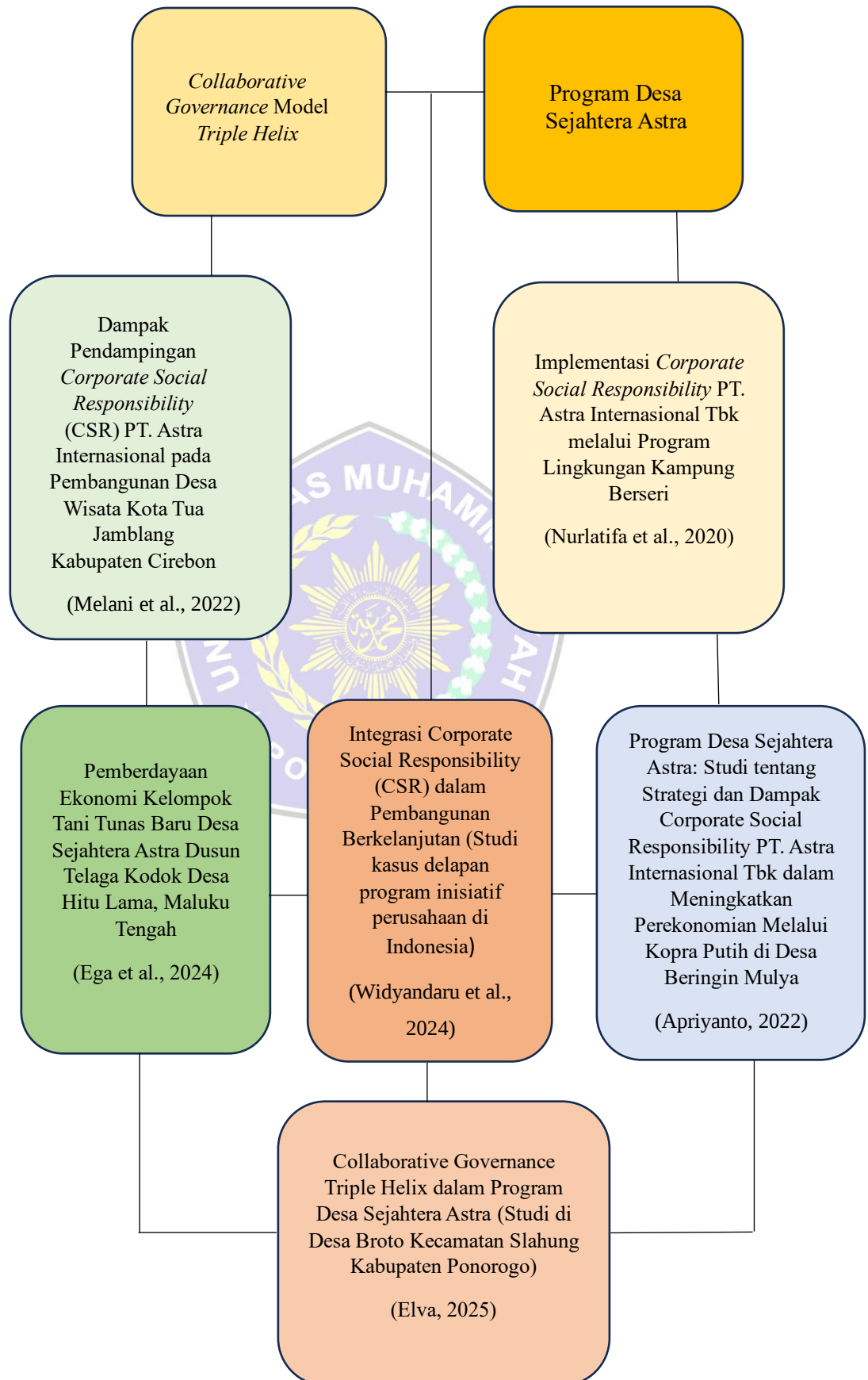
Penelitian ketiga, yaitu ditulis oleh (Ega et al., 2024) dengan artikel berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Tani Tunas Baru Desa Sejahtera Astra Dusun Telaga Kodok Desa Hitu Lama, Maluku Tengah" tujuan penelitian ini adalah pembangunan sektor pertanian, sebagai elemen kunci dalam Pembangunan bangsa, memainkan peran vital dalam pemulihan perekonomian negara. Peran strategis ini berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, penyediaan bahan makanan dan bahan baku industri, peningkatan ekspor dan pemasukan devisa, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, peningkatan penghasilan petani, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi para petani adalah lemahnya posisi negosiasi mereka. Menggabungkan petani dalam satu forum dapat meningkatkan negosiasi mereka dan menyalurkan alur ekonomi dari tahap pra-produksi hingga pemasaran. Namun, kegiatan ini menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh kelompok usaha, seperti kondisi iklim dan cuaca serta dampak Badai Lanina yang melanda wilayah Maluku Tengah dan sekitarnya, yang mengganggu hasil produksi sayuran organik. DSA Telaga Kodok belum memiliki kemasan pasca panen, sehingga sulit untuk mendapatkan sertifikasi organik. Sertifikasi organik yang telah habis masa berlakunya membuat mitra Farmer Market saat ini tidak bisa menerima sayuran dari DSA Telaga Kodok.

Penelitian keempat, yaitu ditulis oleh Ahmad Joko Apriyanto (2022) melalui skripsi dengan judul "Program Desa Sejahtera Astra: Studi Tentang Strategi Dan Dampak *Corporate Social Responsibility* PT. Astra Internasional Tbk. Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Kopra Putih Di Desa Beringin Mulya" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

pendekatan dan pengaruh dari program CSR Desa Sejahtera Astra dalam meningkatkan ekonomi melalui produksi kopra putih di Desa Beringin Mulya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada pendekatan dan efek dari CSR PT. Astra Internasional Tbk dalam meningkatkan ekonomi melalui kopra putih. Pendekatan dan dampak CSR dalam meningkatkan ekonomi dicapai melalui program pengembangan komunitas yang dilaksanakan dengan model pemberdayaan CSR lewat langkah-langkah strategis. Dari langkah strategis ini disepakati untuk memulai proses pengolahan, yaitu produksi kopra putih. Langkah-langkah strategis tersebut menghasilkan berbagai dampak yang bisa dirasakan secara langsung oleh peserta program serta Masyarakat, diantaranya adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan kemandirian masyarakat.

Penelitian kelima, yaitu ditulis oleh (Widyandaru et al., 2024) melalui artikel berjudul "Integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi kasus delapan program inisiatif perusahaan di Indonesia)" Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana CSR memiliki peranan yang penting dalam mendukung keberlanjutan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji delapan inisiatif CSR terbaik dari beraneka perusahaan yang mencakup bidang lingkungan, pendidikan, inklusif keuangan, serta pemberdayaan komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan strategi bisnis dengan CSR bisa menghasilkan berbagai dampak yang berkelanjutan. Beberapa program yang mencolok seperti Memilah Sampah Menabung Emas dari pengadaan dan lain-lain. Kolaborasi antar bisnis utama perusahaan dan pelaksanaan CSR tidak hanya memenuhi aturan yang berlaku, tetapi juga menciptakan dampak positif untuk keberlanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Tabel 1. 1 Literatur Review



Penelitian terdahulu tersebut semua sama menjelaskan terkait dengan pemberdayaan, kesadaran masyarakat, dampak ekonomi, dampak lingkungan dan sebagainya. Pada penelitian ini peneliti mengambil dengan judul “*Collaborative Governance Triple Helix* dalam Program Desa Sejahtera Astra (Studi di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain yaitu, peneliti lebih fokus kepada bagaimana program CSR antara PT Astra internasional Tbk dan Pemerintah Desa Broto dalam konteks keberlanjutannya. Keberlanjutan baik dalam programnya ataupun keberlanjutan untuk lingkungannya, keberlanjutan lingkungan terkait dengan semua usaha yang dilakukan tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Collaborative Governance

Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansel & Gash (2007) karena program Desa Sejahtera Astra di Kabupaten Ponorogo kolaborasi PT. Astra Internasional Tbk dengan Pemerintah Desa untuk menyalurkan dana CSR perusahaan kepada pemerintah desa melalui pemberdayaan Masyarakat Desa Broto. Pada penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* yang sesuai dengan literatur. *Collaborative governance* menyoroti pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan, kekuatan dan kelemahan yang berbeda, dan yang saling bermitra untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, upaya kolaboratif muncul sebagai pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan tujuan mencapai lebih banyak kreativitas dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan organisasi yang bekerja sendiri (Cahyono, 2021).

A. Pengertian Collaborative Governance

Collaborative governance, menurut Ansell dan Gash (2007) adalah konsep pendekatan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor

swasta, dan organisasi lainnya, dalam proses pengambilan keputusan bersama. Proses ini melibatkan interaksi dan dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama. Ansell dan Gash menegaskan bahwa kolaborasi ini lebih dari sekadar kerja sama karena melibatkan partisipasi yang aktif dan berbasis pada pertukaran informasi yang terbuka dan transparan. Dalam konteks kemitraan antara sektor publik dan swasta, *collaborative governance* memfasilitasi upaya bersama antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk mengatasi masalah pembangunan lokal. Pendekatan ini sangat relevan dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengoptimalkan sumber daya, keahlian, dan pengaruh mereka untuk mencapai dampak yang lebih besar (Ansell & Gash, 2007).

Menurut Emerson & Min Woo Ahn (2022) *Collaborative governance* meningkatkan kualitas keputusan melalui pertukaran pengetahuan dan ide dari berbagai perspektif, serta memperkuat kepercayaan dan hubungan antara aktor yang terlibat. *Collaborative governance* mengacu pada pendekatan kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor-sektor yang berbeda (publik, swasta, dan pemerintah) untuk menangani isu-isu publik atau mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini menekankan pada kemitraan, pengambilan keputusan bersama, dan tindakan kolektif untuk mengatasi masalah-masalah kompleks dalam masyarakat (Emerson & Nabatchi, 2015). *Collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif adalah pendekatan dalam manajemen publik yang menekankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan publik melalui proses partisipatif dan inklusif.

Penerapan teori *collaborative governance* dalam program Desa Sejahtera Astra di Desa Broto menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan sektor swasta, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dirancang dan diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa melalui proses yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep *collaborative governance* memberikan wawasan yang berharga untuk menganalisis kerjasama antara PT Astra International Tbk dan pemerintah Desa Broto dalam konteks program "Desa Sejahtera Astra" untuk pengembangan produk pertanian berkelanjutan. Kerangka kerja ini menyoroti pentingnya kerjasama, tanggung jawab bersama, dan inovasi dalam mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Tujuan Collaborative Governance

Collaborative Governance menekankan bahwa keberhasilan inovasi seringkali bergantung pada interaksi dinamis dan sinergi antara semua aktor tersebut. Dalam konteks program desa, model ini mengilustrasikan kolaborasi antara pemerintah desa dan sektor swasta. Dalam konteks *collaborative governance* yaitu memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana kemitraan antara PT Astra International TBK sebuah perusahaan multinasional dan pemerintah Desa Broto bisa bersinergi. Kolaborasi seperti ini dapat mendorong inovasi dalam proyek-proyek pembangunan masyarakat, meningkatkan kapasitas lokal, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Carayannis et al., 2012).

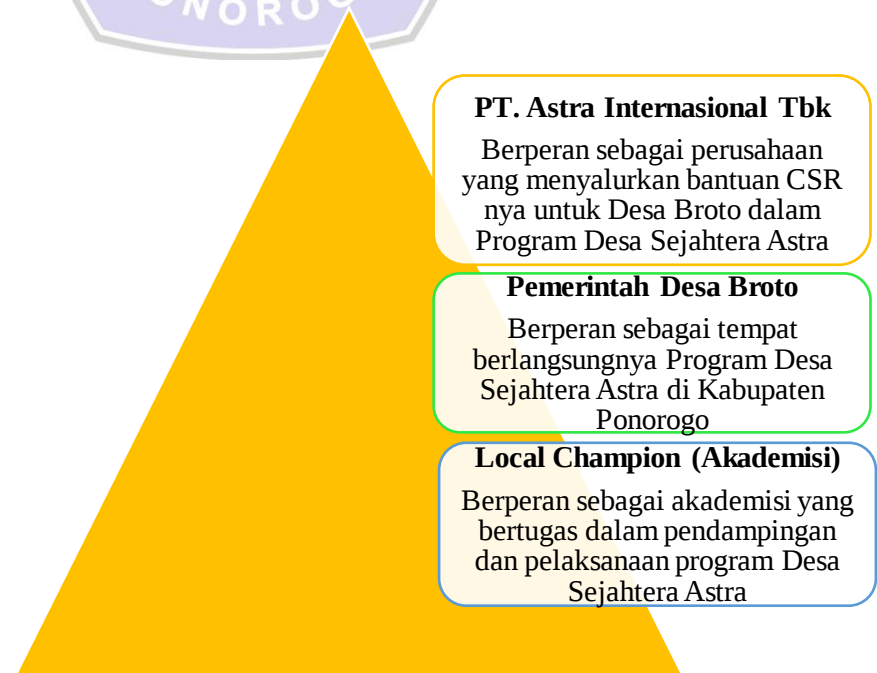
Menurut Ansell dan Gash, tujuan dari *collaborative governance* adalah mengembangkan pendekatan baru dalam tata kelola untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks di sektor publik dengan mencapai kesepakatan melalui kolaborasi antara

berbagai pihak yang terlibat. *Collaborative governance* merupakan usaha pemerintah untuk mengatasi isu-isu publik dengan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta lainnya, guna meningkatkan kualitas hasil dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penelitian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana inisiatif kolaboratif seperti ini dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

C. Proses *Collaborative Governance*

Proses *Collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2007) adalah rangkaian kinerja yang bekerja dengan membentuk suatu runtutan, dan saling mempengaruhi yang pada intinya adalah proses *collective decision-making*. Proses kolaboratif pada *collaborative governance* dalam program Desa Sejahtera Astra ini dipengaruhi oleh beberapa elemen atau indikator yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 *Collaborative Governance Model Trple Helix* dalam Program Desa Sejahtera Astra



a. Dialog antar muka (*face to face dialogue*)

Semua bentuk pengelolaan kolaboratif didasarkan percakapan langsung antara para pihak terkait. Proses ini ditandai oleh kebutuhan akan “komunikasi mendalam” yang dilakukan melalui interaksi langsung agar para pihak dapat menemukan kesempatan yang saling menguntungkan. Namun, percakapan langsung tidak sekadar alat untuk bernegosiasi. Ini merupakan esensi dari usaha untuk mengatasi pandangan serta rintangan lainnya dalam pencarian kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini juga merupakan bagian penting dari proses membangun kepercayaan, saling menghargai, pemahaman, serta komitmen bersama dalam proses tersebut (Ansell & Gash, 2007).

b. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat merupakan pondasi yang harus dibangun. Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan menjadi titik tolak yang umum untuk tata Kelola pemerintah kolaboratif. Seorang pemimpin yang efektif dalam kolaborasi menyadari bahwa penting untuk menciptakan kepercayaan dan menyelesaikan hambatan sebelum menghadapi kemungkinan manipulasi pemangku kepentingan. Ada kebutuhan akan aktivitas dan peningkatan yang berkelanjutan. Membangun kepercayaan menghasilkan hubungan kerja yang kokoh, proses membangun kepercayaan berlangsung secara bertahap dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil bersama (Ansell & Gash, 2007).

c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*)

Komitmen adalah elemen yang penting sekaligus sebuah tantangan signifikan dalam proses kerjasama. Tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh elemen sebelumnya, menciptakan kepercayaan. Berhubungan erat dengan hal ini

adalah kebutuhan untuk terlebih dahulu berkomitmen dalam pengelolaan kolaboratif. Meski demikian, para pihak yang berkepentingan mungkin ingin dilibatkan, misalnya untuk memastikan bahwa pendapat mereka tidak diabaikan, untuk memperkuat legitimasi posisi mereka, dan untuk memastikan bahwa kewajiban hukum tetap terjaga. Di sisi lain, terlibat dalam proses ini berarti membangun keyakinan bahwa negosiasi akan dilakukan dengan niat baik. Untuk mencapai keuntungan bersama, ini adalah pendekatan terbaik untuk mendapatkan hasil politik yang diinginkan (Ansell & Gash, 2007).

d. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pada titik tertentu dalam proses kolaborasi, semua pihak perlu membentuk pemahaman kolektif mengenai apa yang dapat dicapai secara bersama-sama. Kebijakan menjadi elemen krusial yang akan dijelaskan dalam tulisan sebagai “tujuan bersama”. Kesepahaman merupakan syarat fundamental yang diperlukan dalam kerjasama untuk meraih tujuan Bersama. Fokusnya adalah menyatukan penentuan tujuan dan isu agar dapat mengurangi berbagai rintangan dalam mencapai kesepahaman serta mencegah terjadinya kesalahpahaman (Ansell & Gash, 2007).

e. Dampak sementara (*intermediate outcome*)

Dampak sementara dalam konteks ini merujuk pada hasil yang terlihat selama proses kolaborasi yang berlangsung. Kata "sementara" mengindikasikan bahwa dampak ini bersifat sementara atau tidak menetap. Efek sementara ini sangat krusial karena menghasilkan umpan balik yang langsung dirasakan dan bisa dianalisis oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun bersifat sementara, umpan balik ini dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap keberlanjutan kerja sama. Fenomena ini sering diistilahkan sebagai *small win*. Kemenangan-kemenangan kecil semacam ini berfungsi sebagai

pendorong dan penjaga agar kolaborasi tetap pada jalurnya, memperkuat keyakinan dan semangat untuk mencapai tujuan akhir dengan berhasil (Ansell & Gash, 2007).

D. Model *Collaborative Governance*

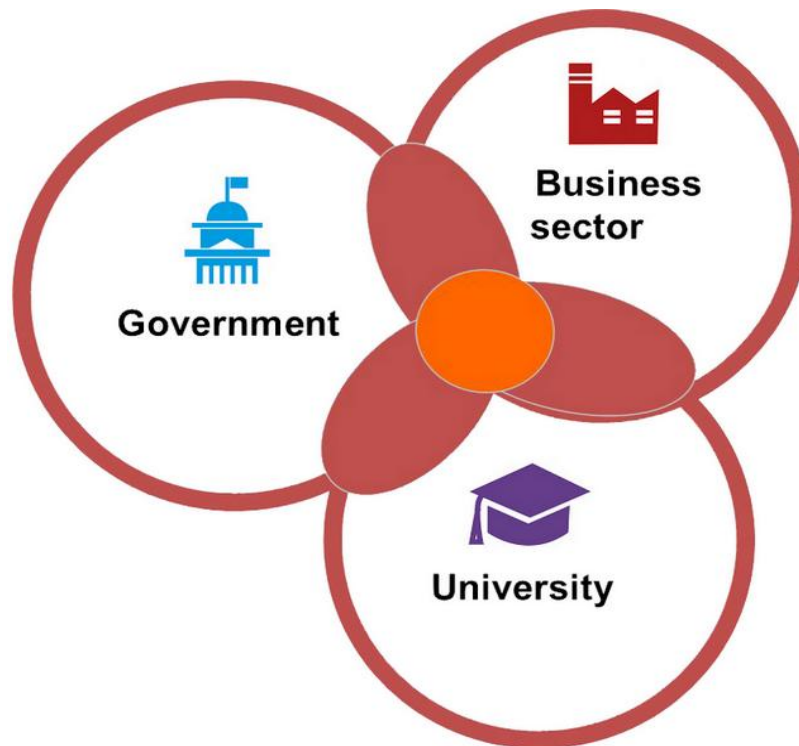
Model *collaborative governance* ada 3 jenis yaitu model *triple helix*, model *Quadruple Helix*, dan model *pentahelix*. Berikut beberapa penjelasan mengenai model kerjasama inovatif yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta yang kemudian dikembangkan dengan beberapa aktor baru. *Collaborative governance* dalam konteks model *triple helix* mengacu pada kerjasama yang melibatkan tiga aktor utama: pemerintah, industri, dan akademisi. Dalam model ini, pemerintah bertindak sebagai pengatur dan fasilitator yang menciptakan kebijakan dan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Industri memainkan peran penting dalam menerapkan inovasi dan teknologi baru yang dikembangkan, sekaligus memberikan umpan balik praktis yang dapat membantu meningkatkan relevansi penelitian akademis. Akademisi, di sisi lain, menyediakan pengetahuan dan penelitian yang menjadi dasar bagi inovasi dan pengembangan teknologi. Melalui sinergi antara ketiga aktor ini, *collaborative governance* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengembangan teknologi. Namun dalam penelitian ini bukan akademisi dilibatkan melainkan petani atau Masyarakat yang ikut andil didalam prosesnya. Model *triple helix* ini mendorong kolaborasi yang dinamis dan adaptif, dimana setiap aktor saling melengkapi dan mendukung, menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Model *Quadruple Helix* merupakan konsep yang mengembangkan model *Triple Helix* (pemerintah, industri, dan

universitas) dengan menambahkan dimensi keempat, yaitu masyarakat atau publik. Dalam model ini, interaksi antara keempat aktor pemerintah, dunia usaha, academia, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan inovasi yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mengakui peran penting masyarakat dalam proses inovasi, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun kontribusi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan penelitian. Konsep ini relevan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, dimana inovasi tidak hanya terbatas pada dunia akademis atau industri, tetapi harus melibatkan partisipasi sosial yang lebih luas agar hasilnya dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Model *Quadruple Helix* sering dikaitkan dengan pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan keberlanjutan dalam inovasi (Akmalluddin & Ediyono, 2023).

Model *Pentahelix dalam Collaborative Governance* adalah sebuah pendekatan kolaborasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, sektor bisnis, masyarakat, akademisi, dan media, untuk bersama-sama merancang dan mengimplementasikan kebijakan atau program pembangunan. Setiap pihak memainkan peran yang saling mendukung: pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator, sektor bisnis memberikan sumber daya serta inovasi, akademisi menyediakan riset dan kajian ilmiah, masyarakat berkontribusi melalui partisipasi aktif dan umpan balik, serta media berfungsi untuk menyampaikan informasi dan melakukan pengawasan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan solusi yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan inklusif, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan di antara semua aktor yang terlibat dalam proses pembangunan atau pembuatan kebijakan (Setya Yunas, 2019).

Gambar 1. 2 Model Triple Helix



1.7.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, pembangunan berkelanjutan lingkungan adalah upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dicapai tanpa merusak kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan di masa mendatang (UNDP, 2024).

Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan lingkungan

mencakup perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang efektif, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. UNDP juga mendorong transisi menuju penggunaan energi terbarukan dan praktik ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap alam. Tujuan ini selaras dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama pada tujuan ke-13 tentang aksi iklim, tujuan ke-14 tentang ekosistem laut, dan tujuan ke-15 tentang ekosistem darat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan lingkungan tidak hanya melibatkan upaya pelestarian alam tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai tanpa melampaui batas daya dukung planet.

UNDP juga menekankan pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*), yang mencakup 17 tujuan global untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. SDGs menjadi kerangka kerja utama dalam upaya menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh dunia (Putri & Putri, 2022). Berikut penjelasan mengenai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Pertama tanpa kemiskinan, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala aspek yang ada diseluruh dunia. Menghapus kemiskinan yaitu menjadi landasan utama untuk pembangunan berkelanjutan karena dengan kondisi ekonomi yang stabil dan sejahtera akan mempengaruhi sektor-sektor ;ain dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Tujuan yang kedua yaitu, tanpa kelaparan yang berfokus pada penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta pengembangan sistem pertanian berkelanjutan.

Kelaparan terjadi karena kurangnya konsumsi pangan yang baik dari segi jumlah maupun kualitas gizi, yang berdampak buruk jika tidak ditangani dengan baik. Dengan memastikan distribusi pangan yang merata maka kelaparan akan diatasi dengan baik.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*)

Ketiga bertujuan untuk menjamin kesehatan yang baik serta kesejahteraan semua orang tanpa memandang segala aspek seperti usia dan starta kehidupan. Pembangunan sektor kesehatan seperti peningkatan fasilitas Kesehatan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia karena memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran sosial masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang berkualitas, individu dapat memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan taraf hidup, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial.

5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Tujuan kelima adalah yang berfokus pada pencapaian keseimbangan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara, perempuan dapat memiliki peran lebih besar dalam pembangunan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)

Keenam adalah komitmen dalam menyediakan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

yang ada di seluruh dunia, kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan dasar bagi manusia.

7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Energi yang menekankan pentingnya akses luas terhadap energi yang terjangkau, andal berkelanjutan dan modern. Penggunaan energi harus dilakukan secara efisien memanfaatkan sumber daya terbarukan.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)

Tujuan kedelapan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan memberikan kesempatan kerja yang layak bagi semua orang. Pembangunan ekonomi yang baik harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)

Tujuan ini berfokus kepada pembangunan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif, serta dorongan terhadap inovasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi pembangunan berkelanjutan.

10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequality*)

Berkurangnya kesenjangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di suatu negara. Pendekatan terpadu diperlukan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial melalui peningkatan akses layanan dasar untuk mencapai kesejahteraan

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)

Bertujuan untuk menekankan pentingnya menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, inklusif dan ramah lingkungan. Perencanaan kota yang baik harus mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)

Tujuan ini memastikan bahwa pola konsumsi dan produksi manusia dilakukan dengan cara lebih berkelanjutan. Peningkatan konsumsi dan produksi yang tidak terkendali dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, peningkatan limbah, serta degradasi lingkungan yang serius.

13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

Tujuan ini mengajak seluruh negara untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tantangan perubahan iklim seperti emisi karbon, perlu adanya pembenahan untuk mengurangi masalah tersebut.

14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water*)

Bertujuan menekankan pentingnya menjaga kelestarian serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan jangka panjang. Laut dan samudra memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan global, mengatur suhu bumi, serta menyediakan oksigen dan sumber pangan bagi manusia.

15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*)

Menjaga ekosistem daratan yang bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan mengelola lingkungan daratan dengan cara yang berkelanjutan. Dengan menerapkan pengelolaan sumber daya daratan yang berkelanjutan, manusia dapat memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh alam serta menjaga stabilitas lingkungan hidup di bumi.

16. Perdamaian, Keadilan, dan lembaga yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*)

Kenambelas bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil dan inklusif guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan membangun sistem hukum yang kuat tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan menekankan pentingnya kolaborasi global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tantangan global yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, sehingga diperlukan kerja sama antara negara maju dan berkembang, sektor swasta, serta organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini mencakup berbagai aspek, seperti investasi dalam pembangunan infrastruktur, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap kebijakan nasional yang sejalan dengan target SDGs.

Pada penelitian ini fokus peneliti adalah untuk meneliti pembangunan berkelanjutan kemitraan untuk mencapai tujuan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan programnya. Serta melihat dampaknya terhadap lingkungan dan bagaimana mengelola sumber daya dan menjaga keanekaragaman hayati pada produk pertanian berkelanjutan dalam konteks kerjasama PT. Astra dan Pemerintah Desa Broto.

Gambar 1. 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan UNDP



1.8 Definisi Operasional

Collaborative governance merupakan serangkaian rangkaian kerja yang bekerja dengan membentuk suatu runtutan, dan saling mempengaruhi yang pada intinya adalah proses *collective decision-making*. Model *collaborative governance* memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana kemitraan antara PT Astra International sebuah perusahaan multinasional, pemerintah Desa Broto, dan mungkin institusi akademik atau organisasi masyarakat bisa bersinergi. Akan tetapi dalam penelitian ini pihak ketiga yaitu Masyarakat dalam hal ini petani yang bekerja sebagai petani kunyit yang dilibatkan dalam program ini. Definisi operasional dalam penelitian ini, berdasarkan indikator-indikator dari teori *collaborative governance* adalah kerjasama antara PT Astra Internasional Tbk dan pemerintah Desa Broto sehingga terdapat dimensi sebagai berikut:

1.8.1 Dialog antar muka (*face to face dialogue*)

Collaborative governance terjadi atas dialog antar muka yang dilakukan antara pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana proses *collaborative governance* berjalan dengan

berkomunikasi secara langsung antara PT Astra Internasional Tbk agar kebijakan terhadap program DSA berjalan dengan semestinya.

1.8.2 Membangun kepercayaan (*trust building*)

Collaborative governance terjadi atas membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat dalam membuat kebijakan. Dengan membangun kepercayaan antara PT Astra Internasional Tbk dan Pemerintah Desa Broto maka akan terjalin Kerjasama yang mampu membangun komitmen jangka panjang untuk mencapai keberhasilan Bersama.

1.8.3 Komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*)

Collaborative governance terjadi atas dasar komitmen yang kuat dalam proses kerjasama antar pemangku kepentingan. Dalam proses ini kedua aktor berkomitmen dalam memastikan keberhasilan program ini, kemudian memastikan legitimasi posisi, dan memastikan kewajiban hukum dipenuhi.

1.8.4 Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pada tahap ini *collaborative governance* terjadi harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang bisa dicapai bersama. Akal sehat dipakai agar misi bersama tercapai antar kedua belah pihak. Tujuan pemahaman bersama antar PT Astra Internasional Tbk dan Pemerintah Desa Broto untuk mengurangi banyaknya hambatan dalam mencapai pemahaman bersama.

1.8.5 Dampak sementara (*intermediate outcome*)

Collaborative governance terjadi atas hasil yang terlihat selama proses kolaborasi antara PT Astra Internasional Tbk dan Pemerintah Desa Broto yang berlangsung. Dampak sementara dalam proses kolaborasi ini sangat penting karena menghasilkan umpan balik yang langsung dapat dirasakan dan dievaluasi oleh semua pihak yang terlibat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis dalam prosesnya. Penelitian kualitatif berfokus pada subjek, proses, makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori sebagai pondasi agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti menjelaskan gambaran yang kompleks dan menyeluruh, kemudian menganalisis kata-kata yang tepat dan informasi yang diperoleh dari informan atau subjek dalam latar situasi yang alamiah (natural setting) dan menyajikannya dalam sebuah laporan untuk diuji keabsahan datanya. Dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Broto Kecamatan Slahung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan informan yang berada di Desa Broto yang menjadi tempat kolaborasi antar aktor yaitu PT Astra Internasional Tbk dan Pemerintah Desa Broto. Maka dari itu pengambilan data, peneliti lakukan di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

1.9.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah pemerintah Desa Broto dan PT Astra Internasional tbk dalam program Desa Sejahtera Astra. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif, *purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Metode

ini digunakan karena peneliti memilih beberapa individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dan peneliti meminta informan untuk merekomendasikan orang lain yang juga dapat memberikan informasi yang berguna (Lenaini, 2021). Oleh karena itu, untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat, maka dibutuhkan informan yang memahami mengenai informasi yang disampaikan berkaitan langsung dengan masalah penelitian ini. Maka informan yang di pilih peneliti diawal dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu:

1. Slamet Riyanto, selaku pendamping Desa Sejahtera Astra (DSA) Ponorogo
2. Erika Widi Atmoko, selaku sebagai Kepala Desa Broto Kecamatan Slahung
3. Maspiyah, selaku sebagai local champion Desa Sejahtera Astra (DSA) Ponorogo
4. Santi, selaku sebagai salah satu anggota Gabungan Kelompok Tani Desa Broto

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode untuk memastikan keakuratan dan keberagaman informasi yang diperoleh. Metode yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali informasi secara rinci dari narasumber, sementara dokumentasi memberikan data yang nyata ada di lapangan. Observasi lapangan membantu peneliti memahami konteks dan kondisi nyata dari objek penelitian.

a. Wawancara

Menurut John W. Creswell, wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik dan pendekatan yang penting. Pertama, Creswell menekankan pentingnya menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka memungkinkan peserta

memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam, mengungkapkan pandangan dan pengalaman pribadi mereka tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, wawancara kualitatif menurut Creswell adalah interaksi dinamis antara pewawancara dan peserta. Pewawancara harus mampu membangun hubungan yang baik dengan peserta, menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka agar peserta merasa bebas untuk berbagi informasi. Ketiga, Creswell menekankan pentingnya menggunakan teknik probing untuk mendalami jawaban peserta. Probing melibatkan pertanyaan tambahan yang bertujuan mendapatkan penjelasan lebih lanjut, contoh spesifik, atau klarifikasi dari jawaban yang sudah diberikan. Keempat, wawancara kualitatif harus fleksibel, memungkinkan pewawancara menyesuaikan pertanyaan berdasarkan alur percakapan dan tanggapan peserta. Fleksibilitas ini penting untuk mengeksplorasi topik yang muncul secara spontan selama wawancara. Kelima, Creswell merekomendasikan penggunaan alat rekam untuk mencatat wawancara secara akurat. Setelah wawancara, transkripsi verbatim dari rekaman harus dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis adalah representasi yang akurat dari wawancara. Keenam, data yang dikumpulkan dari wawancara harus dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Creswell menyarankan penggunaan metode analisis tematik untuk mengekstrak pola dan makna dari jawaban peserta, yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir, pemahaman tentang konteks dan latar belakang peserta sangat penting dalam wawancara kualitatif (Cresswell, 2013).

b. Observasi

Observasi dalam penelitian adalah proses pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek yang menjadi fokus studi. Observasi dalam penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memahami

konteks, perilaku, dan interaksi sosial dalam situasi alami. Peneliti secara langsung mengamati objek atau fenomena yang diteliti tanpa intervensi, mencatat detail yang relevan melalui catatan lapangan, audio, atau video. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang makna, pengalaman, dan perspektif partisipan dalam konteks sosialnya. Dengan menggunakan observasi, peneliti dapat menggali dinamika yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain, sehingga memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti (Babbie, 2014).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti laporan, arsip, kebijakan, surat kabar, dan dokumen resmi lainnya. Metode ini sangat berguna untuk mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari sumber lain dan memberikan konteks tambahan terhadap fenomena yang sedang dianalisis. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengakses data historis dan memahami perkembangan suatu isu dari waktu ke waktu, serta menganalisis bagaimana kebijakan atau praktik tertentu diterapkan dalam konteks tertentu. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat menggali pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dalam data primer, sehingga memperkaya hasil penelitian dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif (Babbie, 2014).

1.9.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penting dalam mengolah informasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati. Teknik-teknik analisis seperti deskriptif digunakan untuk merangkum karakteristik dasar data, sedangkan teknik

inferensial memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih luas dari sampel yang ada. Analisis eksploratori membantu dalam menemukan pola atau tren yang mungkin tersembunyi, sementara teknik prediktif memungkinkan untuk membuat prediksi berdasarkan data historis (Ahmad & Muslimah, 2021). Pentingnya analisis kualitatif juga diakui dalam mengolah data yang tidak berbentuk numerik, memberikan wawasan mendalam melalui analisis tematik atau content analysis. Gabungan teknik-teknik ini memberikan fondasi yang kokoh untuk mengambil keputusan yang terinformasi dan merumuskan strategi berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap data yang ada.

Dalam penelitian ini perlu digunakannya analisis data agar penelitian ini dapat berjalan dengan benar sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penelitian. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model dari (Miles et al., 2014) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Komponen dalam analisis datanya sebagai berikut:

a. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data adalah proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, merangkum, dan membuat catatan lapangan, protokol wawancara, dokumen, dan bahan eksperimen lainnya. Kondensasi membuat data lebih stabil. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, mengkategorikan, memusatkan, menggabungkan, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Kondensasi data tidak selalu melibatkan pengukuran kuantitatif. Data kualitatif dapat diubah dengan berbagai cara, termasuk melalui seleksi, ringkasan atau parafrase, dan dimasukkan ke dalam pola yang lebih besar. Kesimpulannya, proses kompresi data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara, memperoleh data dokumen lapangan dari teks wawancara, dan mengkategorikannya untuk memperoleh fokus penelitian yang diinginkan peneliti.

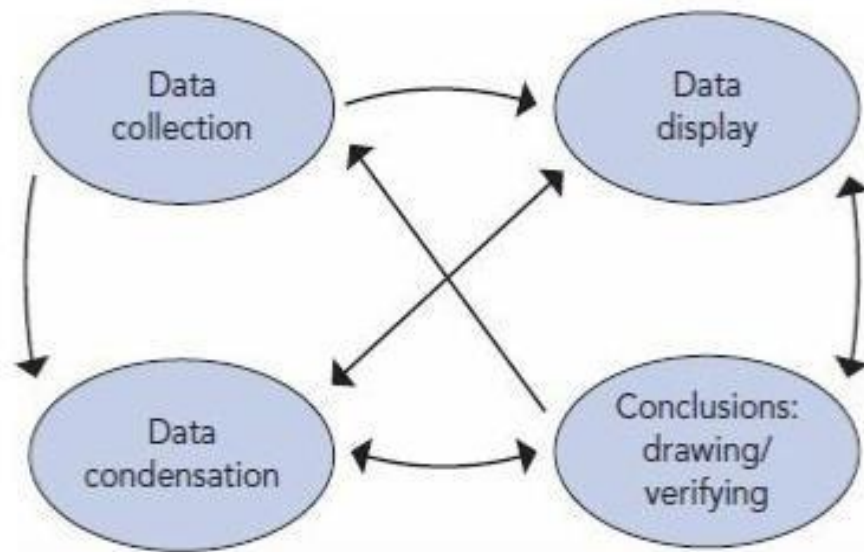
b. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut (Miles et al., 2014) mengartikan penyajian data dalam arti luas sebagai informasi yang mengatur, menggabungkan, dan memberikan kesimpulan. Penyajian data di sini juga membantu untuk memahami konteks penelitian ketika analisis yang lebih rinci dilakukan. Semuanya dirancang untuk mengumpulkan informasi terstruktur dalam format yang ringkas dan mudah diakses, sehingga analis dapat dilihat apa yang sebenarnya terjadi dan menarik kesimpulan yang sah atau memberikan saran. Dengan tersebut kita dapat melanjutkan ke langkah analisis yang disarankan berikutnya, yang mungkin berguna. Dengan melihat presentasi tersebut, akan memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan, serta kita akan dapat melakukan analisis lebih lanjut dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dari presentasi.

c. *Conclusions Drawing* (Menarik Kesimpulan)

Menarik Kesimpulan (*Conclusions Drawing*) adalah tahap kritis dalam proses analisis data kualitatif menurut (Miles et al., 2014). Tahap ini tidak sekadar tentang merangkum temuan, tetapi lebih pada memahami esensi dari data yang telah dikumpulkan. Miles & Huberman menegaskan bahwa untuk mencapai kesimpulan yang kuat dan bermakna, peneliti perlu menyintesis informasi dari berbagai sumber data secara menyeluruh. Ini mencakup mengidentifikasi pola-pola yang muncul, tema-tema yang dominan, serta memahami variasi dan kompleksitas dalam data. Dengan demikian, proses menarik kesimpulan bukan hanya tentang merangkum data, tetapi juga menginterpretasikan makna di balik fenomena yang diteliti untuk memperkaya pemahaman kita tentang konteks yang lebih luas.

Gambar 1. 4 Bagan Model Analisa Data



Sumber: (Miles et al., 2014)

1.9.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dianggap valid dan dapat dipercaya. Melalui upaya atau tindakan dapat memujudkan kepercayaan untuk dipertanggung jawabkan kebenarannya. Maka uji keabsahan data diperlukan untuk memberikan hasil yang optimal.

Pada penelitian ini keabsahan data akan diuji dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebuah teknik atau pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data. Teknik ini melibatkan penggunaan lebih dari satu metode, sumber data, teori, atau peneliti untuk mengonfirmasi atau memverifikasi temuan yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan menghadirkan sudut pandang yang beragam serta memeriksa konsistensi temuan dari berbagai sudut. Tipe triangulasi dikemukakan oleh Denzin (1978) bahwa triangulasi memiliki empat hal, yaitu triangulasi antar penelitian, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data (Denzin, 1978).

Pada penelitian ini, menggunakan triangulasi metode. Metode triangulasi penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan metode ini untuk membuktikan bahwa penelitian datanya benar adanya secara nyata dilapangan. penggunaan teknik triangulasi dalam penelitian sangat penting karena dapat membantu mengurangi bias, meningkatkan kepercayaan, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam dan terverifikasi terhadap fenomena yang diteliti.

